

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Rifa'i, M.A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afifuddin M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Amrynudin, D. K. A. (2024). *Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan* Vol. XVI, No. 5 (March).
- Ardipandanto, A. (2022). *Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalism KPU. Kajian: Menjembatani Teori Dan Persolan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan, vol 27, No. 1.*
- Alasman Mpesau. (2021). *Kewenangan badan pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan indonesia. Jurnal (ACLJ), Vol. 2, Issue 2, 2021.*
- A. Febri Handra, "Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sebagai Perwujudan Demokrasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Pesisir Selatan," *UNES Law Rev.*, vol. 4, no. 3, pp. 309–316, 2022, doi: 10.31933/unesrev.v4i3.241.
- A. Mpesau, "Trasformasi Elektronika Digital dalam Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di persidangan Perselisihan di Mahkamah Konstitusi," *J. Ilmu Manaj. Sos. Hum.*, vol. 6, no November, pp. 21-29, 2024, doi; 10.51454/jimsh.v6i1.446.
- Budi Saputra, (2019). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- F. R. Yoganda, "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Menggunakan Metode Pieces Framework," *J. Litbang Kota Pekalongan*, vol. 20, No. 1, pp. 77-86, 2022.
- Flavio, Angelo Emanuel. (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Fianosa Publishing.
- Faisal Rahman. (2016). *Meneropong Integritas Penyelenggaran Pemilu*. Jurnal Ide, KPU, Volume 13, hlm. 9.
- H. Chaverlin, D. M. Liando, and T. E. Tulung, "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020," *J. Gov.*, vol. 2, No. 1, pp. 1-10, 2022.

- Handitya Binov. (2018). *Peran Serta Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum Vol.4.
- Jehamun, P. (2024). *Beberapa Faktor Penyebab Sirekap KPU Salah Membaca Data*, <https://beritabernas.com/dr-yudi-prayudi-ini-beberapa-faktor-penyebab-sirekap-kpu-salah-membaca--data/>. Diakses pada tanggal 16 mei pukul 12. 30 WIB.
- Murtopo Ali. (1981). *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- M, Wiratha, I. (2006). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta:ANDI.
- Mahpudin. (2019). *Teknologi Pemilu, Trust, Dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG Pada Pilpres 2019*. Jurnal Polgow, Vol. 01,No. 01.
- Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Martosoewignjo Sri Soemantri. (1989). *Lemabaga- Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, D., Utama, J. Y., & Arief, A. (2021) IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PERUBAHAN SOSIAL TEKNIS PILKADA 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). Jurnal Neo Societal, 6(1), 91.
- Oktatari Pakamase. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. (2019) *Penegaka hukum dalam pemilihan umum*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3 (1), 99-100.
- Pratama, K.J. (2023). Penguatan Sistem Informasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum: Tantangan dan Regulasi Tata Kelola Data. Majalah Hukum Nasional, 15 (1), 91-109, DOI : 10.33331/mm.v5i1.218
- Prasetyo, Eko. (2012). *Data miring konsep dan aplikasi menggunakan MATLAB*. ANDI.
- Prahasta, E. (2005). *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Informatika Bandung.
- Rahayu Ani Sari. (2017). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resky Rahmadani. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktid untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subakti, R., Suprianto, D., Hasyim Asya'ri. (2011). *Menjaga Itegritas Pemungutan dan Perhitungan Suara*. Jakarta: Kementrian bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Simanjuntak Josner. (2016). *Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesi*. Jurnal Papua Law. Hlm 120-122.
- Siagian, Sondang P. (1990). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Saetriyan, F. A., et al. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi Defecte Pada Pemilu 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol. 1, No. 3.
- Ubaidillah A. dan Rozok Abdul. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi Jakarta: Prenada Media.
- Victor M, Situmorang. (1998). *Aspek-aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Vaganza, A. S. (2023). *Kualitas Pelayanan Tahapan Pmungutan Perhitungan Dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Studi Pemilihan Wali Kota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung)*, *Skripsi, Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Warsita, Bambang. (2008) *Teknologi Pembelajaran: Landasan&Aplikasinya*, Jakarta: Rineka
- Yosa. (2010). *Pengawasan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Kementrian Dalam Negeri. Hlm 45.
- Zuhri, S. (2020). *Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perhitungan dan Rekapitulasi Suara*. 2019: *Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*, 1-17.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemiluhan Umum Nomor 10 Tahun 2003 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Problematika yang terjadi tentang Penggunaan Rekapitulasi. Diakses pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

<https://pemilu2024.kpu.go.id/>

Rencana revisi , DPR ingin sirekap dan digitalisasi pemilu diatur UU. Diakses Pada hari selasa tanggal 25 April 2024 pukul 16.55 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/16554191/rencana-revisi-dpr-ingin-sirekap-dan-digitalisasi-pemilu-diatur-uu.>

Salah Data di Sirekap Capai 154.541 TPS, KPU: Sudah dikoreksi. Diakses pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 11.47 WIB.

<https://nasional.kompas.com./read/2024/02/27/>